

Analisis Dampak Penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II

Tina Kunti Anggraeni¹, Rachmawaty^{2*}, Zulfitra³

Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Pamulang

tina.anggraeni@bmkgo.go.id¹, dosen01925@unpam.ac.id^{2*}, dosen01137@unpam.ac.id³

Received 16 Januari 2026 | Revised 18 Februari 2026 | Accepted 10 Maret 2026

*Korespondensi Penulis

Abstract

This study analyzes the impact of the implementation of Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 on the effectiveness and efficiency of budget utilization at Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II. The analysis focuses on a comparison of conditions before and after the policy's implementation, covering budget realization, performance output achievements, and the Budget Implementation Performance Indicator (IKPA). The results indicate changes in budget planning and implementation patterns, marked by savings in capital expenditures and optimization of goods expenditures. The Wilcoxon (Mann–Whitney) test on effectiveness data for the period March 2024–October 2025 shows a p-value of 0.0173 (<0.05), indicating a significant difference in the level of budget effectiveness after the policy implementation. In contrast, the IKPA results show a p-value >0.05 , meaning there is no significant difference in the median IKPA between the periods before and after the policy. Overall, efficiency improved through tighter control of goods expenditures, restrictions on official travel, and the reduction of non-essential activities. These findings strengthen recommendations for more effective and efficient budget governance within government institutions.

Keywords: Presidential Instruction Number 1 of 2025; Budget Efficient; Budget Effective; BBMKG Region II; Nation's Finance.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II. Analisis difokuskan pada perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan, mencakup realisasi anggaran, capaian output kinerja, serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil menunjukkan perubahan pola perencanaan dan pelaksanaan anggaran, ditandai penghematan belanja modal dan optimalisasi belanja barang. Uji Wilcoxon (Mann–Whitney) pada data efektivitas periode Maret 2024–Oktober 2025 menunjukkan p-value 0,0173 ($<0,05$), sehingga terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas anggaran setelah penerapan kebijakan. Sebaliknya, pada IKPA diperoleh p-value $>0,05$ sehingga tidak terdapat perbedaan median IKPA yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan. Secara umum, efisiensi meningkat melalui pengendalian belanja barang, pembatasan perjalanan dinas, dan pengurangan aktivitas non-esensial. Temuan ini memperkuat rekomendasi tata kelola anggaran yang lebih efektif dan efisien di instansi pemerintah

Kata Kunci: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Efektivitas Anggaran; Efisiensi Anggaran; BBMKG Wilayah II; Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran belanja, pemerintah

Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja negara. Hal ini selaras dengan tujuan dari reformasi birokrasi yang merujuk pada upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja dari instansi - instansi pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja di berbagai lembaga negara pentingnya pengelolaan anggaran belanja yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Serta memastikan bahwa anggaran belanja digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II dalam konteks ini memiliki peran vital dalam menyediakan layanan data dan informasi terkait cuaca, iklim, geofisika dan tsunami untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, akurat dan mudah dimengerti di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan mitigasi bencana. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Balai Besar Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Wilayah II memiliki nilai PAGU Rp. 79.071.205.000,- dengan sumber dana Rp. 63.061.085.000 berasal dari rupiah murni dan Rp. 16.010.120.000,- berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun berjalan. Instruksi Presiden Nomor I TA 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di terbitkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Januari 2025 yang dalam penerapannya wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dalam penerapannya Instruksi Presiden nomor I Tahun 2025 memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Selama penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengalami beberapa kali proses revisi DIPA, baik itu yang melalui DJA (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan) maupun revisi KANWIL DJA. Hal ini menyebabkan adanya penurunan pagu DIPA Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II menjadi Rp. 75.497.631.000,- yang

terdiri dari Rp. 61.284.745.000,- berasal dari Rupiah Murni dan Rp. 14.212.886.000,- berasal dari PNBP tahun berjalan. Terjadi penurunan jumlah anggaran yakni sebesar Rp. 3.573.574.000,- atau sekitar 4.52 % dari pagu awal DIPA.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran satuan kerja Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 sebagai data pembanding untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sebelum dan sesudah penerapan instruksi Presiden nomor I Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi Belanja Kantor Balai Besar MKG Wilayah II pada periode semester I yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 22.469.501.174,- atau 28.42 % dari anggaran belanja sebesar Rp 79.071.205.000,-. Dibandingkan dengan Periode 30 Juni 2024, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.2.020.307.473,- dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karna berkurangnya pagu anggaran tahun 2025 terutama untuk belanja modal. Rendahnya realisasi belanja periode triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu dampak dari penerapan Instruksi Presiden Nomer I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merespon dengan cepat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menerbitkan instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II melalui surat nomor e.B/KU.01.02/001/SU/I/2025 perihal Efisiensi di lingkungan BMKG Tahun Anggaran 2025 yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bagian dan upt di lingkungan BMKG. Dampak dari penerapan Instruksi Presiden nomor I Tahun 2025 BMKG harus melakukan efisiensi sebesar Rp.2.826.897.302.000,- yang terdiri 2 Program, 22 kegiatan, 156 KRO, dan 223 RO yang terdapat pada 196 Satker BMKG.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 dalam pelaksanaan realisasi anggaran yang dialokasikan kepada Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Banten. Dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana

penggunaan anggaran tersebut dapat mendukung fungsi dan tugas Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Signifikansi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II, terutama dalam konteks pelayanan publik yang sangat bergantung pada informasi cuaca dan iklim. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran di masa mendatang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap data anggaran yang tersedia, serta wawancara dengan pihak terkait di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan anggaran.

Dengan keluarnya Instruksi Kepala BMKG menyebabkan perubahan Signifikan dalam pola perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II, dengan melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja barang dan mengurangi aktifitas di kantor seperti penggunaan alat-elektronik, kegiatan meeting diluar kantor, serta perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan rutin terkait peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II, serta mendukung upaya mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 telah diterapkan secara nasional dan berdampak pada perubahan pagu serta realisasi anggaran di berbagai instansi, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja teknis masih terbatas. Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada efektivitas anggaran serta dinamika efisiensi dan IKPA sebelum dan

sesudah kebijakan diterapkan. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian pengelolaan anggaran publik lebih menitikberatkan pada aspek konseptual efisiensi atau evaluasi kinerja secara umum, tanpa menguji secara statistik perbedaan kinerja sebelum dan sesudah intervensi kebijakan fiskal spesifik. Selain itu, kajian yang mengaitkan efektivitas, efisiensi, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam satu kerangka analisis terpadu pada unit kerja teknis seperti BBMKG Wilayah II juga masih jarang dilakukan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian pada aspek: (1) pengujian empiris dampak kebijakan efisiensi nasional terhadap kinerja anggaran di level satuan kerja, (2) penggunaan pendekatan kuantitatif komparatif berbasis uji nonparametrik, serta (3) integrasi indikator efektivitas, efisiensi, dan IKPA dalam satu model evaluasi kebijakan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur tata kelola keuangan publik berbasis kebijakan.

Tinjauan Pustaka

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk melakukan efisiensi / pengurangan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang membutuhkan efisiensi pengelolaan keuangan serta penyesuaian penggunaan sumber daya. Tujuan dari Inpres ini adalah memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih Efektif, bijak dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan prioritas pembangunan, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi. Untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut dibutuhkan rencana kerja dan anggaran yang berkualitas, karena rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, tidak didukung oleh perencanaan serta tidak berbasis data akan menghasilkan deviasi atau Gap antara rencana dan realisasi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara umum meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan penghematan anggaran. Meskipun detail spesifik mengenai jumlah pengurangan dan sektor yang terkena belum sepenuhnya dijelaskan, beberapa bidang yang biasanya menjadi fokus pengurangan anggaran dalam kebijakan serupa

antara lain: Belanja yang tidak prioritas, Subsidi yang tidak tepat sasaran, Proyek Infrastruktur yang tidak mendesak. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam proses pemangkas anggaran, serta meminta setiap lembaga untuk menyusun rencana penyesuaian anggaran yang rinci dan melaporkannya secara rutin melalui aplikasi Monev (Monitoring dan Evaluasi).

Instruksi Presiden Nomer I Tahun 2025 terhadap Efektivitas pelaksanaan Anggaran

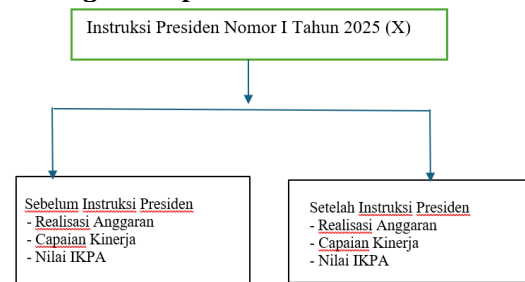
Menurut Halim dan Abdullah (2021) Efektivitas anggaran pemerintah sangat bergantung pada integrasi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan seperti Instruksi Presiden harus diterjemahkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan yang terukur. Sedangkan menurut Soemartono (2022) Efektivitas dalam kebijakan fiskal pemerintah mencerminkan kemampuan anggaran untuk mendorong pencapaian tujuan kebijakan strategis negara, seperti pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, atau reformasi birokrasi.

Instruksi Presiden Nomer I Tahun 2025 terhadap Efisiensi pelaksanaan Anggaran

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional secara terintegrasi dan efektif. Salah satu aspek fundamental yang menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan ini adalah efisiensi anggaran. Kebijakan publik yang dirancang dan dilaksanakan tanpa pertimbangan efisiensi akan berisiko menyebabkan pemborosan sumber daya, keterlambatan output, serta penyimpangan tujuan kebijakan. Menurut Mahmudi (2020) Efisiensi anggaran adalah cara menentukan seberapa baik input (biaya) yang digunakan dapat menghasilkan output (hasil) yang maksimal. Suatu kegiatan disebut efisien jika dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan biaya yang sekecil mungkin. Sedangkan menurut Simanjuntak (2020) Efisiensi dalam keuangan publik berarti kemampuan pemerintah menggunakan dana dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal, tanpa menambah beban keuangan yang tidak perlu. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah bagian dari

kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional secara terpadu dan efektif. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan ini adalah efisiensi penggunaan anggaran. Jika kebijakan publik tidak dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan efisiensi, maka bisa terjadi pemborosan sumber daya, keterlambatan dalam mencapai hasil, serta penyimpangan dari tujuan awal kebijakan. Efisiensi anggaran menjadi faktor penting (Y_2) yang dipengaruhi oleh penerapan Inpres (X). Dalam pemikiran ini, semakin baik penerapan Inpres, maka semakin efisien penggunaan anggaran karena kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan, tidak boros, serta berdasarkan rencana yang berbasis kinerja.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan nilai efektivitas sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada Satuan Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan nilai efisiensi sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada Satuan Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II.
3. Terdapat perbedaan nilai IKPA sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada Satuan Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II.

METODE

Dalam penelitian ini uji analisis dilakukan untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan dari variable – variable Independen yaitu Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 terhadap variable Depend yakni Efektivitas Anggaran (Y_1) dan Efisiensi

Anggaran (Y2. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu dengan mengumpulkan data – data laporan pengelolaan anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II, serta didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Pimpinan Satuan Kerja, Pengelola Anggaran serta bagian yang terdampak dari penerapan Instruksi tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji Statistik Non Parametrik dan Uji Komparatif menggunakan Wilcoxon Test. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II.

Istilah nonparametrik pertama kali diperkenalkan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik nonparametrik adalah pendekatan statistik yang dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan asumsi dasar yang diperlukan dalam metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering dipakai untuk statistik nonparametrik adalah statistik tanpa distribusi dan uji yang tidak bergantung pada asumsi. Statistik nonparametrik sering diterapkan dalam penelitian sosial. Data yang dihasilkan dari penelitian sosial umumnya berupa kategori atau dalam bentuk peringkat. Uji statistik nonparametrik merupakan jenis uji statistik yang tidak memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi data populasi. Metode statistik ini dikenal pula sebagai statistik tanpa distribusi. Statistik nonparametrik tidak membutuhkan bentuk distribusi parameter populasi yang beredar normal. Pendekatan nonparametrik dapat diterapkan untuk menganalisa data yang bersifat nominal atau ordinal, karena biasanya data dengan jenis tersebut tidak mengikuti distribusi normal. Dari segi jumlah data, metode statistik nonparametrik umumnya efektif untuk dataset yang berukuran kecil ($n < 30$).

Keunggulan Statistik Nonparametrik

1. Asumsi yang terdapat dalam berbagai uji statistik nonparametrik cenderung lebih

fleksibel. Ketika analisis data menunjukkan bahwa satu atau lebih dari asumsi yang mendasari uji statistik parametrik, seperti karakteristik distribusi data, tidak dipenuhi, maka statistik nonparametrik menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan statistik parametrik.

2. Proses perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana, sehingga hasil penelitian dapat segera disampaikan.
3. Untuk memahami berbagai konsep dan metode yang ada, tidak diperlukan pengetahuan matematika atau statistika yang mendalam.
4. Uji-uji dalam statistik nonparametrik dapat digunakan jika kita mengalami keterbatasan dalam data yang ada, contohnya jika data diukur dengan skala pengukuran yang rendah, seperti skala nominal atau ordinal.
5. Efisiensi dari statistik nonparametrik lebih baik dibandingkan dengan metode parametrik ketika jumlah sampel relatif kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Beda Wilcoxon Test

Uji wilcoxon signed test merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk Mengulas dua keadaan yang terhubung (contoh berpasangan). Menilai apakah median dari perbedaan pasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Metode ini merupakan pilihan non-parametrik sebagai pengganti paired sample t-test, digunakan ketika data menampilkan distribusi tidak normal atau dalam skala ordinal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test adalah sebagai berikut :

Uji Beda Efektivitas

Berikut adalah hasil analisis uji beda untuk variable efektivitas anggaran sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025.

Tabel 1. Tabulasi Data Efektivitas

No	SATKER	Bulan	Efektivitas (Dalam %)	Dummy INPRES
1	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M03	9,61	0
2	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M04	11,89	0
3	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M05	14,95	0
4	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M06	32,21	0

No	SATKER	Bulan	Efektivitas (Dalam %)	Dummy INPRES
5	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M07	39,13	0
6	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M08	44,34	0
7	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M09	45,64	0
8	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M10	50,2	0
9	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M11	68,45	0
10	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M12	100	0
11	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M01	0	1
12	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M02	0	1
13	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M03	0	1
14	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M04	0	1
15	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M05	0	1
16	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M06	0	1
17	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M07	0	1
18	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M08	14,19	1
19	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M09	56,52	1
20	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M10	56,82	1

Sumber : Olahan Penulis, 2025

Tabel ini menunjukkan informasi mengenai tingkat efektivitas bulanan (dalam persentase) dari Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II sepanjang kurun waktu dari Maret 2024 sampai Oktober 2025. Berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan dan ditampilkan dalam tabel efektivitas, dilakukan studi komprehensif mengenai kinerja Balai Besar MKG Wilayah II. Data yang dianalisis meliputi periode antara Maret 2024 sampai Oktober 2025, serta mencakup variabel intervensi yang diwakili oleh kebijakan yang dilambangkan dengan variabel Dummy_Inpres.

Pada Tahun 2024 (Maret hingga Desember 2024) merupakan saat belum diterapkannya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025, ditandai dengan nilai Dummy_Inpres berada di angka nol, terlihat adanya pola peningkatan efektivitas yang bersifat linier dan bertahap. Di awal pelaksanaan anggaran (Maret 2024), efektivitas tercatat sebesar 9.61% . Angka tersebut terus mengalami peningkatan yang konsisten setiap bulannya seiring terealisasikannya pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Kenaikan yang signifikan mulai terlihat pada pertengahan tahun (Juni 2024) dengan hasil mencapai 32.21 %, dan kemudian mencapai angka sempurna 100 % di akhir tahun anggaran (Desember

2024). Fenomena ini menunjukkan adanya pengelolaan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program yang dipercepat pada kuartal terakhir. Pola ini sejalan dengan siklus umum dalam birokrasi, di mana peningkatan kinerja sering kali terpusat pada akhir periode guna mencapai target output yang ditentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2025, yang ditandai oleh perubahan pada variabel Dummy_Inpres menjadi 1, teridentifikasi adanya anomali data yang berupa stagnasi performa pada tingkat 0,00 % selama tujuh bulan pertama (Januari hingga Juli). Secara teori, keadaan ini bisa dipahami sebagai fase peralihan atau reorientasi program akibat keberadaan kebijakan baru yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2025. Tidak adanya angka efektivitas pada semester pertama tahun 2025 disebabkan oleh proses penyesuaian administratif, perubahan target, atau keterlambatan dalam penerbitan pedoman pelaksanaan teknis yang baru. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2025, kinerja mulai memperlihatkan pemulihan (relaksasi anggaran) dengan pencapaian 14,19 %, dan kembali mengalami percepatan yang signifikan pada bulan September 56,52 % serta Oktober 56,82 %.

Tabel 2. Hasil Wilcoxon Test RGEC Efektivitas

Test for Equality of Medians of EFEKTIVITAS__DALAM__
Categorized by values of DUMMY_INPRES
Date: 11/21/25 Time: 16:04
Sample: 2024M03 2025M10
Included observations: 20

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		2.381176	0.0173
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		2.432947	0.0150
Med. Chi-square	1	7.200000	0.0073
Adj. Med. Chi-square	1	5.000000	0.0253
Kruskal-Wallis	1	5.851429	0.0156
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	6.108634	0.0135
van der Waerden	1	5.915456	0.0150

Category Statistics

DUMMY_I...	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	10	41.73500	8	13.70000	0.474640
1	10	0.000000	2	7.300000	-0.424900
All	20	14.57000	10	10.50000	0.024870

Untuk memvalidasi signifikansi perbedaan efektivitas kinerja antara tahun 2024 (dummy = 0) dan tahun 2025 (dummy = 1), penelitian ini menggunakan metode statistik non-parametrik Uji Wilcoxon Signed-Rank. Pemilihan uji ini didasarkan pada karakteristik data yang berpasangan (paired) dan Uji ini dipilih karena data tidak mengasumsikan distribusi normal dan jumlah sampel relatif kecil. Berdasarkan analisis yang dilakukan, nilai statistik Wilcoxon/Mann-Whitney tercatat sebesar 2,381176 dengan nilai probabilitas (p-value) yang mencapai 0,0173. Nilai p ini lebih rendah daripada ambang signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak atau yang artinya tidak ada perbedaan / pengaruh efektivitas antara kelompok DUMMY_INPRES = 0 dan DUMMY_INPRES = 1. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam median efektivitas antara dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan setelah diterapkannya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025. Hasil ini diperkuat oleh uji nonparametrik lain yang konsisten, seperti Wilcoxon tie-adjusted ($p = 0,0150$), Kruskal-Wallis ($p = 0,0156$), dan Adjusted Median Chi-square ($p = 0,0253$), yang semuanya menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05.

Hipotesis yang diuji dalam uji Wilcoxon ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kelompok DUMMY_INPRES = 0 memiliki median efektivitas sebesar 41.735 dengan mean rank 13.7.
2. Kelompok DUMMY_INPRES = 1 memiliki median efektivitas sebesar 0.000 dengan mean rank 7.3.

Interpretasi hasil tersebut adalah median efektivitas kelompok DUMMY_INPRES = 0 jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok DUMMY_INPRES = 1.

Nilai mean rank yang lebih tinggi pada kelompok DUMMY_INPRES = 0 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai efektivitas pada kelompok ini berada pada peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok DUMMY_INPRES = 1. Dengan demikian, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas anggaran, khususnya pada objek penelitian Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II.

Uji Beda Efisiensi

Berikut adalah hasil analisis uji beda untuk variable efisiensi anggaran sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025

Tabel 3. Wilcoxon Test RGEC Efisiensi

No	SATKER	Bulan	Efektivitas (Dalam %)	Dummy INPRES
1	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M03	14.85	0
2	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M04	18.54	0

No	SATKER	Bulan	Efektivitas (Dalam %)	Dummy INPRES
3	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M05	23.01	0
4	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M06	30.64	0
5	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M07	36.07	0
6	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M08	41.53	0
7	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M09	45.24	0
8	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M10	56.15	0
9	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M11	62.34	0
10	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M12	79.35	0
11	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M01	3.19	1
12	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M02	7.32	1
13	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M03	14.50	1
14	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M04	17.89	1
15	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M05	21.53	1
16	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M06	28.42	1
17	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M07	32.19	1
18	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M08	38.84	1
19	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M09	44.87	1
20	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M10	51.41	1

Sumber : Olahan Penulis, 2025

Tabel tersebut menyajikan data efisiensi pada masa sebelum implementasi INPRES (Dummy_Inpres = 0), yang berlangsung dari Maret 2024 sampai Desember 2024, indikator efisiensi anggaran menunjukkan peningkatan yang terus menerus. Efisiensi anggaran naik dari 14,85 persen di Maret 2024 menjadi 79,35 persen di Desember 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa manajemen anggaran selama periode tersebut semakin baik, sejalan dengan meningkatnya kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan pengeluaran dengan pagu anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, pada masa setelah penerapan INPRES (Dummy_Inpres = 1), yaitu dari Januari 2025 hingga Oktober 2025, efisiensi anggaran awalnya tercatat lebih rendah, dengan angka sebesar 3,19 persen pada Januari 2025. Meskipun begitu, efisiensi mulai menunjukkan pola peningkatan secara bertahap sampai mencapai 51,41 persen pada bulan Oktober 2025. Situasi ini menggambarkan adanya adaptasi awal terhadap kebijakan penghematan dan kontrol anggaran sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel 4. Hasil Wilcoxon Test RGEC Efisiensi

Test for Equality of Medians of EFISIENSI_DALAM____

Categorized by values of DUMMY_INPRES

Date: 11/21/25 Time: 16:27

Sample: 1 20

Included observations: 20

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		0.566947	0.5708
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		0.566947	0.5708
Med. Chi-square	1	0.800000	0.3711
Adj. Med. Chi-square	1	0.200000	0.6547
Kruskal-Wallis	1	0.365714	0.5453
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	0.365714	0.5453
van der Waerden	1	0.430701	0.5116

Category Statistics

DUMMY I...	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	10	715167.5	4	9.700000	-0.130788
1	10	731970.0	6	11.300000	0.130788
All	20	719378.0	10	10.500000	-8.88E-17

Tabel 5 Tabel Uji nonparametrik

Median Chi-Square dengan p-value	0.3711
Adjusted Median Chi-Square dengan p-value	0.6547
Kruskal-Wallis dengan p-value	0.5453
van der Waerden dengan p-value	0.5116

Seluruh nilai probabilitas ini berada di atas 0,05, yang semakin memperkuat bahwa perbedaan efisiensi antara kedua kelompok tidak signifikan.

Uji Beda IKPA

Berikut adalah hasil analisis uji beda untuk variable efisiensi anggaran sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025

Tabel 6. Wilcoxon Test IKPA

No	SATKER	Bulan	Efektivitas (Dalam %)	Dummy INPRES
1	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M03	90.33	0
2	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M04	88.59	0
3	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M05	88.20	0
4	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M06	87.78	0
5	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M07	87.54	0
6	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M08	87.81	0
7	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M09	87.34	0
8	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M10	88.05	0
9	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M11	87.22	0
10	Balai Besar Mkg Wilayah II	2024M12	93.47	0
11	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M01	98.50	1
12	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M02	100.00	1
13	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M03	100.00	1
14	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M04	85.97	1
15	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M05	94.95	1
16	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M06	82.10	1
17	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M07	80.29	1
18	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M08	79.22	1
19	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M09	77.79	1
20	Balai Besar Mkg Wilayah II	2025M10	77.80	1

Sumber : Olahan Penulis, 2025

Berdasarkan 47ingk diatas, periode sebelum Inpres (Dummy Inpres = 0), yaitu antara Maret 2024 hingga Desember 2024, skor IKPA menunjukkan kestabilan yang tinggi dan berada di dalam rentang 87,22% hingga 93.47%. Angka IKPA selama rentang waktu ini mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang cukup positif dan berkelanjutan, meskipun ada variasi kecil setiap bulannya. Pencapaian tertinggi IKPA sebelum Inpres dicapai pada Desember 2024 yang mencapai 93,47%, sementara nilai terendah tercatat pada November 2024 dengan angka 87,22%.

Memasuki periode setelah penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025

(Dummy Inpres = 1), yaitu dari Januari 2025 hingga Oktober 2025, nilai IKPA mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada awal diberlakukannya Inpres, IKPA meningkat secara drastis, bahkan mencapai 98,50% pada Januari 2025 dan 100% pada Februari dan Maret 2025, menunjukkan upaya cepat satuan kerja dalam memenuhi tujuan kinerja anggaran. Namun, setelah periode itu, nilai IKPA tampak mengalami pengurangan secara bertahap, dengan angka terendah terpantau pada September–Oktober 2025 sekitar 77–78%. Kondisi tersebut disebabkan oleh dampak penyesuaian penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025.

Tabel 6. Hasil Wilcoxon Test IKPA

Test for Equality of Medians of IKPA_DALAM ____
Categorized by values of DUMMY_INPRES ____
Date: 12/30/25 Time: 17:50
Sample: 1 20
Included observations: 20

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.474061	0.1405
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.474616	0.1403
Med. Chi-square	1	3.200000	0.0736
Adj. Med. Chi-square	1	1.800000	0.1797
Kruskal-Wallis	1	2.285714	0.1306
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	2.287434	0.1304
van der Waerden	1	2.362132	0.1243

Category Statistics

DUMMY_I...	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	10	718700.5	3	8.500000	-0.306271
1	10	729663.0	7	12.500000	0.306121
All	20	725826.0	10	10.500000	-7.48E-05

Pembahasan

Analisis dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II dilakukan dengan pendekatan uji beda tingkat α ric Wilcoxon (Mann-Whitney) karena data tidak memenuhi asumsi normalitas dan jumlah periode data tingkat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran di Balai Besar MKG Wilayah II memiliki perbedaan yang mencolok antara periode sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melalui analisis uji beda tingkat α ric Wilcoxon (Mann-Whitney) yang memberikan nilai probabilitas (p-value) yang lebih rendah dari 5 persen, sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan efektivitas tidak dapat dipertahankan secara tingkat α .

Dari segi deskriptif, efektivitas anggaran pada fase sebelum INPRES (Dummy_Inpres = 0) menunjukkan median yang jauh lebih tinggi daripada periode setelah INPRES (Dummy_Inpres = 1). Ini menunjukkan bahwa kapasitas unit kerja dalam mewujudkan output dan mencapai target kinerja anggaran lebih optimal sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Tingginya tingkat efektivitas di periode awal mencerminkan kondisi yang lebih fleksibel dalam perencanaan, kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, serta belum adanya pembatasan penggunaan anggaran yang berpotensi menghalangi pencapaian tujuan program kegiatan. Dari sudut pandang kebijakan ingka, hasil ini menunjukkan bahwa INPRES Nomor 1 Tahun 2025 memiliki

dampak nyata pada efektivitas pelaksanaan anggaran pada Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II khususnya dalam periode tahun anggaran 2025. Kebijakan pengendalian anggaran dengan pendekatan top-down cenderung membatasi kebebasan satuan kerja dalam mewujudkan program dengan maksimal. Ketika tingkat α anggaran lebih banyak ditentukan di tingkat pusat, satuan kerja memiliki fleksibilitas yang terbatas untuk melakukan penyesuaian waktu, volume kegiatan, maupun alokasi sumber daya yang diperlukan agar program berjalan optimal. Dalam kondisi ini, satuan kerja cenderung hanya berfokus pada kepatuhan administratif (compliance) daripada pada pencapaian hasil (outcome) program. Akibatnya, meskipun anggaran terserap atau terealisasi sesuai ketentuan, tujuan substantif program, yakni efektivitas pelaksanaan kegiatan tidak tercapai secara optimal sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menekankan bahwa perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor I Tahun 2025 tidak hanya mempengaruhi aspek penghematan anggaran saja, tetapi juga berdampak pada pencapaian kinerja dan efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara tujuan pengendalian anggaran dan usaha untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program supaya target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran di Balai Besar MKG Wilayah II mengalami

perubahan signifikan antara periode anggaran sebelum dan sesudah diterapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Secara umum, sebelum adanya INPRES (yakni periode 2024), efisiensi anggaran menunjukkan peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara bertahap seiring dengan kestabilan dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Tingkat efisiensi pada periode ini meningkat dari nilai yang relatif rendah di awal tahun hingga mencapai nilai yang cukup baik di akhir tahun anggaran. Situasi ini menandakan bahwa kemampuan pengelolaan anggaran yang fleksibel, kepastian anggaran, serta kesinambungan implementasi program sangat penting dalam mendorong tercapainya efisiensi yang ideal. Dengan adanya kebebasan yang lebih besar, unit kerja dapat menyesuaikan distribusi sumber daya dengan kebutuhan nyata dalam melaksanakan kegiatan.

Sebaliknya, periode saat penerapan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025, efisiensi anggaran menunjukkan penurunan cukup tajam pada awal periode, sebelum mengalami peningkatan perlahan di bulan-bulan selanjutnya. Pola ini mencerminkan adanya fase penyesuaian terhadap kebijakan kontrol anggaran yang diterapkan secara top-down. Pada fase awal, adanya pembatasan anggaran dan penyesuaian pada prioritas belanja mengakibatkan rendahnya tingkat penyerapan dan optimalisasi anggaran, sehingga efisiensi belum dapat tercapai sepenuhnya.

Walaupun demikian, peningkatan efisiensi secara perlahan di pertengahan hingga akhir periode 2025 menunjukkan bahwa unit kerja mulai beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, penguatan sistem pengendalian internal, serta penekanan pada belanja yang menjadi prioritas berperan positif dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, jika dibandingkan dengan periode sebelum diterapkannya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025, tingkat efisiensi pada periode ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Analisis mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang cukup kompleks. Di awal tahun anggaran 2025, IKPA Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika Wilayah II menunjukkan nilai yang cukup tinggi, bahkan berada di kategori sangat baik. Kondisi ini menggambarkan tingginya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap norma administrasi anggaran, seperti ketepatan waktu dalam pelaksanaan, kualitas perencanaan awal, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Namun, seiring dengan berjalannya tahun anggaran, nilai IKPA mengalami penurunan yang bertahap, dengan titik terendah yang terjadi pada bulan September hingga Oktober 2025.

Penurunan nilai IKPA tidak hanya mencerminkan rendahnya kinerja unit kerja, melainkan lebih sebagai akibat dari adanya tekanan kebijakan kontrol anggaran. Penyesuaian anggaran, penundaan kegiatan, revisi DIPA, serta kehati-hatian dalam pengeluaran memiliki dampak pada beberapa aspek penilaian IKPA, seperti deviasi dalam penyerapan anggaran, kesesuaian rencana pengambilan dana, dan ketepatan waktu penyelesaian tugas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang fokus pada stabilitas fiskal nasional dapat menyebabkan adanya trade-off terhadap kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat operasional.

Apabila ketiga indikator tersebut dianalisis secara keseluruhan, disimpulkan bahwa kebijakan pengendalian anggaran cenderung meningkatkan efisiensi, mengurangi efektivitas, dan memberikan tekanan pada kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam jangka pendek. Efisiensi meningkat karena unit kerja dituntut untuk berhemat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas serta IKPA bisa menurun jika kebijakan itu tidak diiringi dengan fleksibilitas operasional dan mekanisme adaptasi yang cukup di tingkat pelaksana.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis statistik nonparametrik menggunakan uji Wilcoxon (Mann-Whitney), pada data efektivitas anggaran Balai Besar MKG Wilayah II selama periode Maret 2024 (sebelum penerapan Instruksi Presiden) hingga Oktober 2025 (setelah penerapan Instruksi Presiden), dapat ditarik kesimpulan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan perbedaan signifikan pada tingkat efektivitas anggaran. Hasil pengujian menunjukkan p-value sebesar 0,0173, yang lebih kecil dari tingkat

signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol yang mengklaim bahwa tidak ada perbedaan efektivitas anggaran sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan dan pengurangan anggaran melalui Instruksi Presiden tersebut telah berdampak secara statistik terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di BBMKG Wilayah II. Selain itu, analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa median efektivitas anggaran sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan fase setelah kebijakan itu diterapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari kebijakan pengendalian belanja adalah untuk memperbaiki disiplin fiskal dan efisiensi, pada tahap awal pelaksanaannya, kebijakan tersebut dapat berpotensi menurunkan pencapaian target kinerja anggaran, khususnya pada unit kerja teknis seperti BBMKG Wilayah II yang sangat bergantung pada kelancaran pendanaan untuk operasional dan program. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon (Mann–Whitney), dengan nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan median IKPA yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Nasution, (2021). Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33.Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Adri, M., & Azhar, N. (2008). *Uji Validitas dan Reliabilitas Paket Multimedia Interaktif*. Jakarta: Ilmu Komputer
- Agus, Mikha widiyanto. (2013). *Statistika Terapan. Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Agus, S Irfani. 2020. *Manajemen Keuangan Dan Bisnis : Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Akbar, Firlana dan Fahmi Irham. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* Vol. 5, No. 1, 2020 Februari: 62-81 E-ISSN: 2598-635X, P-ISSN: 2614-7696.
- Akhmad Sugandi, Hery Nariyah, Nursahidin Nursahidin, (2024). Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu. *Japendi Publikasi Indonesia*.
- Hani Hatimatunnisani, (2020). Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Di Puslitbang Jalan Dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Bandung.
- Hari Sriwijayanti, Leni Gustina, Nike Apriyanti (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Unidha*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 2 Tentang Laporan Arus Kas– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Kansa Nurul Aini Amelia Medindari, Hafizh Yudha Arianto, Cica Wahyuni, Ade Sri Mulyani (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Journals Unisba*
- Komarudin, & Sarkadi. (2017). Evaluasi Pembelajaran. L. P. Sinambela, “Metodologi penelitian kuantitatif,” 2021.
- Lira Pappa, Firman Menne, Seri Suriani, 2023. Unibos. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar.
- Magdalena, R. et al. (2021) “Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Indeks Massa Tubuh Pada Situasi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sains Olahraga dan Pendidikan Jasmani*, Ellyda Zahra Arfinanda, 2024 21, hal. 99–109.
- Miftahul Hasanah1), Merri Anitasari, 2019. Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas).
- Renita Renita, Dessy Kumala Dewi, M Irwan, (2023). *Ejournal Unik*. Analisis Realisasi

- Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi).
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Wati Yessy, Baiq Anggun Hilendri L, Yusli Mariadi, (2022) Analisis Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.